



DUKUNG VALIDITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN

Kaji Ulang Parameter Kemiskinan Kota Yogya

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya berupaya mengkaji ulang atau review atas parameter yang digunakan untuk mengukur angka kemiskinan. Upaya ini perlu ditempuh guna mendukung validitas program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah baik dari tingkat pusat hingga daerah.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, menjelaskan angka kemiskinan di Kota Yogya pada tahun 2022 mencapai sekitar 6,62 persen atau 29,68 ribu jiwa. "Angka tersebut telah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sekitar 7,69 persen. Hal ini menunjukkan adanya indikasi perbaikan, namun angka kemiskinan harus terus ditekan," jelasnya, Kamis (23/11).

Menurutnya, strategi penanggulangan kemiskinan Kota Yogya pada tahun 2023 tetap dengan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui Bantuan Penerima

Iuran JKN, Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), PKH dan Bansos Pangan. Selain itu juga melalui program peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan pelatihan-pelatihan serta kesempatan dan peluang kerja. Dilakukan juga pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil melalui pembinaan dan bimbingan teknis UMKM.

Singgih menjelaskan sasaran penanggulangan kemiskinan tahun 2023 bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dirilis Kemensos. Data itu lantas di-

lakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menurutnya, parameter yang digunakan akan berpengaruh terhadap kekuatan data dan sasaran tertentu. Sehingga, review parameter perlu diperbarui sehingga menghasilkan data yang lebih valid dan menggambarkan kondisi riil keluarga miskin.

"Data sasaran kemiskinan menjadi penting karena menjadi basis penting dari suatu intervensi dan bahkan menjadi dasar sejak disusunnya perencanaan program penanggulangan kemiskinan. Tentu saja data sasaran yang dimaksud harus valid dan terolah dengan baik," terangnya.

Pada tahun 2024 Kota Yogya mendapat kuota sejumlah 587 keluarga lansia melalui program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) oleh Pemda DIY. Hal tersebut merupakan pro-

gram percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem berupa pemenuhan kebutuhan pokok lansia dalam bentuk voucher yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY.

"Pemenuhan kebutuhan pokok ini dalam bentuk voucher yang dapat digunakan di toko-toko yang telah ditentukan. Harapannya, agar dapat digunakan dengan bijak," tambahnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya Agus Tri Haryono, menjelaskan parameter yang telah digunakan sejak satu dekade lalu dirasa sudah tidak tepat pada kondisi saat ini dan mempengaruhi keakuratan data sasaran kemiskinan pada tahun 2023. Berapa indikator yang dirasa sudah tidak relevan misalnya pada penggunaan daya listrik 450 KWH, status suami atau istri bekerja serta tingkat pendapatan perkapita.

"Selain itu juga ada kebutuhan untuk memasukkan indikator lainnya sesuai dengan isu strategis yang berkembang dan pertemuan di lapangan misalnya berkaitan dengan penyandang disabilitas yang dalam parameter sebelumnya belum diakomodir dan penyakit kronis yang tiba-tiba terjadi ini menyebabkan goyahnya kondisi keuangan keluarga," ungkapnya.

Harapannya, dengan dihasilkan parameter baru ini dapat menjadi acuan dalam pendataan sasaran kemiskinan serta menghasilkan data yang lebih akurat sesuai dengan kondisi keluarga. Acuan yang terdiri tujuh aspek yaitu pendapatan dan aset, papan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan dan sosial terdapat beberapa parameter yang disertai dengan bobot skor yang akan dikaji ulang agar lebih relevan. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005